

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM JUAL  
BELI *FRANCHISE* OUTLET PINKY GUARD  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FURQON ROMADHONI A. P.**

**C100150105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Putlet Pinky  
Guard (Studi Putusan Perkara No.18.Pdt/2018/Pn.Skh)**

### **PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**FURQON ROMADHONI ABDULLAH PUTRA**

**C100150105**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM JUAL BELI**

**FRANCHISE OUTLET PINKY GUARD**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

**OLEH**

**FURQON ROMADHONI A. P.**

**C100150105**

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 25 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Ariestya Windiana P, S.H., LLM., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

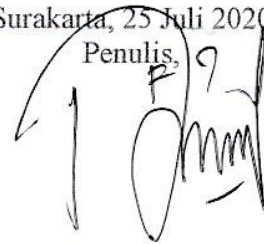
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan di daftar pustaka:

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Juli 2020

Penulis,



**FURQON ROMADHONI A. P.**

**C100150105**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM JUAL  
BELI *FRANCHISE* OUTLET PINKY GUARD  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

**Abstrak**

Tahun 2018 terjadi permasalahan pada perjanjian franchise yang sudah masuk pada ranah pengadilan dan telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penggugat selaku franchisee (penerima warabala) melakukan kerjasama bisnis franchise Outlet Pinky Guard yang akan beroperasi di Manado dengan Tergugat di wilayah Surakarta. Bisnis Outlet Pinky Guard. Ternyata setelah penggugat sudah memnuhi kewajiban dengan menyerahkan sejumlah pembayaran bisnis franchise ternyata tergugat tidak memenuhi hak penggugat dengan menyediakan bahan peralatan yang dibutuhkan. Tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kepada franchisee. Wanprestasi atau ingkar janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak sengaja. Pasal 1267 KUHPdata menjelaskan bahwa jika pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Tujuan penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui proses perjanjian jual beli Franchise Outlet Pinky Guard; b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara wanprestasi jual beli Franchise Outlet Pinky Guard; c) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan perkara wanprestasi jual beli Franchise Outlet Pinky Guard. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli Franchise Outlet Pinky Guard. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli Franchise Outlet Pinky Guard. Perjanjian jual beli franchise outlet Pinky Guard antara Penggugat dengan Tergugat jika dilihat berdasarkan Pasal 7 PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi. Hakim dalam pembuktian menilai jawaban Tergugat tidak membantah keseluruhan gugatan Penggugat. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat mengembalikan Outlet Pinky Guard Manado kepada Tergugat, Hakim dalam pertimbangan hokum menyatakan bahwa Terguguat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli franchise Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Isi daripada putusan hakim diantaranya sebagai berikut: a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; b) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat; c) Menghukum Tergugat untuk membayar uang dan barang yang telah diterima oleh Tergugat senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat; d) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; e) Menghukum

Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

**Kata kunci:** perkara wanprestas, jual beli franchise, penyelesaian melalui pengadilan negeri

### **Abstract**

In 2018 there were problems with the franchise agreement that had entered the realm of the court and had been decided by the judge of the Sukoharjo District Court. Franchisee (franchise recipient) entered into a Pinky Guard Outlet franchise business collaboration which would operate in Manado with the Defendant in the Surakarta area. Pinky Guard Outlet Business. It turned out that after the plaintiff had fulfilled the obligation by handing over a number of franchise business payments, the defendant did not fulfill the plaintiff's rights by providing the required equipment. The Defendant has defaulted due to not fulfilling or failing to carry out the obligations specified in the agreement made to the franchisee. Defaults or broken promises can occur intentionally or unintentionally. Article 1267 of the Civil Code explains that if the party to whom an agreement is not fulfilled can vote, force the other party to fulfill the agreement if it can still be done or demand the cancellation of the agreement with reimbursement of costs, losses and interest. This study aims to a) to find out the process of buying and selling pinky guard franchise outlets; b) to find out the judge's consideration in determining the proof of the case of default sale and purchase of the pinky guard franchise; c) to find out the judge in determining the case decision on the sale and purchase of the pinky guard Franchise outlet. The method of approach used in this research is the normative method, because in this study the law will be examined, the legal principles regarding the process of settling defaults in the sale and purchase of the Pinky Guard Franchise Outlet. The type of research used is descriptive, which is to clearly describe the process of settlement of breach of contract in the sale and purchase of the Pinky Guard Franchise Outlet. The Pinky Guard franchise outlet sale and purchase agreement between the Plaintiff and the Defendant if seen based on Article 7 PP No. 42 of 2007 concerning Franchises in conjunction with Article 5 of the Ministerial Regulation. Trading No. 12M-DAG / PER / 3/2006 Regarding the Provisions and Procedures for the Issuance of Franchise Business Registration Certificates stating that the Defendant is in breach of contract. The judge in the evidence assessed that the Defendant's answer did not refute the entire Plaintiff's claim. The Defendant stated in his exception that the Plaintiff returned the Manado Pinky Guard Outlet to the Defendant, the Judge in legal judgment stated that the Defendant was considered to have committed a default because he did not return the amount of money agreed in the sale and purchase agreement of the franchise. given is in the form of compensation. The contents of the judge's decision are as follows: a) Grant the plaintiff's claim in part; b) Declare the Defendant has breached the Plaintiff; c) Punish the Defendant to pay money and goods that have been received by the Defendant in the amount of Rp. 155. 000. 000.00 (one hundred fifty-five million rupiah) to the Plaintiff; d) Refuse the Plaintiff's claim besides

and the rest; e) Punish the Defendant to pay the costs incurred in this case in the amount of Rp1.006.000.00 (one million and six thousand rupiah).

**Keywords:** case of default,, franchise sale and purchase, settlement brought of a district court

## 1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada jaman modern saat ini sangat cepat berputar setiap waktunya sehingga terkadang sistem bersifat memaksa untuk bekerja untuk mempertahankan kehidupan. Bagi mereka yang dapat bersaing dengan keadaan modern akan meraih kesuksesan, sedangkan yang tidak dapat bersaing akan tersisihkan. Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup memberikan peluang bagi pelaku bisnis memikirkan pola pendistribusian barang maupun jasa dengan baik dan tepat sasaran, salah satunya melalui bisnis *franchise*, dimana pengembangan usaha melalui sistem *franchise* saat ini banyak diterapkan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia (Pariela, 2017).

Istilah *franchise* digunakan dalam padanan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu waralaba. Waralaba terdiri dari kata *wara* dan *laba*. Wara yang berarti lebih atau istimewa, sedangkan *laba* yang berarti untung. Waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang mencari keuntungan lebih maupun istimewa. Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) saat di Jakarta. Pada dunia bisnis di Indonesia lebih senang menggunakan istilah yang utama yaitu *franchise* dan hal ini termuat dalam hukum Indonesia (Muhammad, 2010).

*Franchise* berasal dari bahasa Prancis yaitu *franchir* yang berarti memberi kebebasan kepada para pihak. *Franchise* dapat dilihat dengan 2 (dua) aspek yaitu dalam aspek yuridis maupun bisnis (Salim, 2010). *Franchise* atau waralaba merupakan kemitraan yang mana salah satu pihak menggunakan maupun memanfaatkan merek terdaftar dengan sistem penjualan atau pemasaran yang terbukti menuai hasil serta memberikan asistensi operasional usaha beserta imbalan perjanjian yang disepakati (Karamoy, 2013).

Pengertian mengenai *franchise* dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba pada Pasal 1, yaitu;

“hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Praktik daripada bisnis *franchise* ini dijalankan berdasarkan perjanjian kerjasama demi memberikan kepastian hukum antara pemberi waralaba atau bisasa disebut *franchisor* dengan penerima waralaba atau *franchisee*. Perjanjian *franchise* terdiri dari kiat bisnis berupa metode dan prosedur pembuatan, penjualan dan pelayanan yang dilakukan oleh *franchisor* serta memberikan bantuan pada promosi atau periklanan serta layanan konsultasi (Ilhamdi, 2014).

Tahun 2018 terjadi permasalahan pada perjanjian *franchise* yang sudah masuk pada ranah pengadilan dan telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kasusnya bermula ketika Penggugat selaku *franchisee* (penerima waralaba) melakukan kerjasama bisnis *franchise* Outlet Pinky Guard yang akan beroperasi di Manado dengan Tergugat di wilayah Surakarta. Bisnis Outlet Pinky Guard dihargai sejumlah Rp 125.000.000, 00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Penggugat melakukan pembayaran bisnis *franchise* Outlet Pinky Guard dengan 2 (unit) mobil yaitu Cabin Ford Ranger dengan harga pasaran Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Mercedes Benz C180 dengan kisaran harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tanggal 3 Agustus 2017 Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat yaitu dengan nominal Rp 30.000.000,00 ) tiga puluh juta rupiah) disertai kwitansi dan saksi 2 (dua orang).

Tanggal 3 Maret 2017 Penggugat tidak mendapatkan progres atas pengiriman barang bisnis *franchise* Outlet Pinky Guard dari Tergugat. Selain itu tempat dan bahan juga belum dikirim oleh Tergugat. Sehingga pada Tanggal 3 Agustus 2017 dibuat addendum perjanjian CV. Gelora Pinky Guard Manado yang isinya berupa kompensasi bahwa uang Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada Penggugat. Akan tetapi pada Tanggal 3 Maret 2017 Penggugat tidak menerima uang sepeserpun daripada Tergugat, sehingga hal ini merupakan perbuatan Wanprestasi. Berdasarkan hal ini Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada Pengadilan Negeri domisili Tergugat bahwa



Penguat dirugikan atas perjanjian bisnis *franchise* dengan nominal Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat dengan melakukan sita jaminan aset berupa rumah daripada Tergugat yang berada di Sukoharjo. Selain itu Penguat merasa dirugikan secara materil oleh Tergugat dengan 2,5 %/bulan yaitu sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikali selama 12 (dua belas) bulan dengan total kerugian Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian dari Penguat adalah Rp. 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).

Tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kepada *franchisee*. Wanprestasi atau ingkar janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak sengaja (Miru, 2007). Pasal 1267 KUHPdata menjelaskan bahwa jika pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perkara jual beli *franchise* yang mana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri wanprestasi karena tidak dipenuhi hak pada perjanjian *franchise*, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap perkara jual beli *franchise*, bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan Pengadilan Negeri. Hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul; “Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana proses perjanjian jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard?; b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara wanprestasi dalam jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard?; c) Bagaimana hakim

menentukan putusan perkara wanprestasi dalam jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard?

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Perjanjian Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard**

Tanggal 3 Maret 2017-3 Agustus 2017 belum ada progres untuk pengiriman barang kesana sama sekali outlet atau Gerai Pinky di Manado belum di buat gerainya. Dan bahan baku belum dan atau peralatan sama sekali belum dikirim saksi Pandu. Tanggal 3 Agustus 2017 akhirnya membuat addendum perjanjian tambahan yang berbunyi Pinky Guard Manado di kembalikan kepada CV. Gelora Pinkytama dengan Direktur Bono Defi Aris Andi dengan kompensasi uang atau dana Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saya. Sejak 3 Maret 2017-sekarang Maret 2018 sama sekali uang sepeserpun belum diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat melakukan wanprestasi.

Tergugat dalam hal ini tidak menjalankan perjanjian franchise sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menjelaskan bahwa waralaba memiliki arti berupa hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, franchise diartikan

sebagai: Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa.

Perjanjian jual beli *franchise* outlet Pinky Guard antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban Tergugat sebagai pemberi *franchise* diantaranya sebagai berikut: a) Hak yang diberikan oleh *franchisor* pada *franchisee*.; b) Kewajiban dari *franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh *franchisor* pada saat *franchisee* memulai usaha, maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba; c) Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak *franchisee* kepada pihak lain; d) Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masing-masing pihak.

Tanggal 3 Maret 2018 tergugat meminjam uang Rp10.000.000,00 kepada saya untuk membayar jasa lawyer kepada Seno Bangkit Prakoso, S.H. untuk menggugat seseorang rekan bisnis Tergugat di PN Jakarta Selatan (bukti transfer terlampir). Penggugat dirugikan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Penggugat menetapkan sita jaminan (Conservation Beslaag) terhadap aset rumah milik Bono Defi Aris Andi yang bernomer SHM 2760 dengan luas 110 M<sup>2</sup> di Perum Pondok Indah Permai No. 71 RT 04 RW 08 Sukoharjo di atas nama Bono Defi Aris Andi yang juga beralamat di Perum Pondok Indah Permai No. 71 RT 04 RW 08 Kelurahan Waru Kecamatan Baki Sukoharjo.

Penjelasan mengenai bisnis *franchise* diatur pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, *franchise* diartikan sebagai: Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa.

Peraturan kriteria mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yaitu: a) Waralaba harus memiliki ciri khas usaha; b) Waralaba harus terbukti memiliki sudah memberikan keuntungan. Waralaba harus memiliki standar pelayanan dan standar produk yang

dibuat secara tertulis; c) Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan; d) adanya dukungan secara kesinambungan; e) Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Pasal 7 PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mewajibkan *franchhisor* sebagai pemberi waralaba melakukan *disclosure* terhadap berbagai aspek material yang dapat mempengaruhi keputusan *franchisee* sebagai penerima waralaba untuk menolak atau menerima persyaratan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba atau *franchise agreement* yang meliputi: a) data identitas pemberi waralaba; b) legalitas pemberi usaha waralaba; c) sejarah kegiatan usahanya; d) struktur organisasi pemberi waralaba; e) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f) Tempat usaha; g) daftar penerima waralaba; h) hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

Proses perjanjian jual beli *franchise* outlet Pnky Guard dilakukan pada tanggal 3 Maret 2017 menandatangani perjanjian di Surakarta, jual beli *Franchise* Outlet Pinky Guard di kota Manado sebesar Rp125.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan menyerahkan 2 unit mobil yang pertama adalah 1 unit mobil dobel Cabin Ford Ranger tahun 2007 dengan plat nomer AD 1939 LT warna silver dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Mercedes Benz C180 tahun 1994 warna merah maron dengan plat nomer B 1939 WEQ dengan hargaRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard**

Gugatan mengatakan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas. Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti foto copy perjanjian pembelian waralaba tanggal 3 maret 2017, foto copy bukti pembayaran tanggal 3 maret 2017, foto copy estimasi break even poin, foto copy tanda terima tanggal 7 maret 2017, foto copy rincian pembiayaan outlet tanggal 7 maret, fotocopy perjanjian kerja sama usaha tanggal 7 april 2017, foto copy bukti

pembayaran tergugat pinjem dana tanggal 3 agustus 2017, foto copy perjanjian pengembalian usaha pinky guard.

Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2017 menandatangani perjanjian di Surakarta dengan bukti fotocopy perjanjian pembelian waralaba tanggal 3 maret 2017, jual beli Franchise Outlet Pinky Guard di kota Manado. Pembayaran dilakukan dengan menyerahkan 2 unit mobil yang pertama adalah 1 unit mobil dobel Cabin Ford Ranger tahun 2007 dengan plat nomer AD 1939 LT warna silver dengan dan Mercedez Benz C180 tahun 1994 warna merah maron dengan plat nomer B 1939 WEQ. Tanggal 3 Agustus 2017 Tergugat meminjam dana. Dengan bukti kwitansi dengan saksi Seno Bangkit Prakoso dan Pandu. Tanggal 3 Maret 2017 3 Agustus 2017 belum ada progres untuk pengiriman barang kesana sama sekali outlet atau Gerai Pinky di Manado belum di buat gerainya. Dan bahan baku belum dan atau peralatan sama sekali belum dikirim saksi Pandu. Tanggal 3 Agustus 2017 akhirnya membuat addendum perjanjian tambahan yang berbunyi Pinky Guard Manado di kembalikan kepada CV. Gelora Pinkytama dengan Direktur Bono Defi Aris Andi dengan konpensasi uang akan dikembalikan kepada saya. Sejak 3 Maret 2017 sekarang Maret 2018 sama sekali uang sepeserpun belum diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat melakukan wanprestasi.

Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat mengembalikan Outlet Pinky Guard Manado kepada Tergugat dan Tergugat mau akan tetapi pembayaran menunggu untuk dijual sampai sekarang belum laku dengan demikian Tergugat tidak melakukan wanprestasi. Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama membuat perjanjian dan untuk pengembaliannya akan dirembuk secara musyawarah dan kesepakatan Tergugat mencicil menurut kemampuan berdasarkan foto copy alat bukti perjanjian pengembalian usaha pinky guard, fakta yang terjadi adalah penandatanganan tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2018 hal tersebut juga telah kami dokumentasikan dalam bentuk foto.

Tergugat menyatakan kerugian yang timbul dalam perjanjian jual beli *franchise* tidak rasional dan terkesan Penggugat mencari-cari keuntungan dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan. Sampai saat ini tergugat masih berhubungan baik dan membuka

komunikasi dengan Penggugat sehingga dengan demikian jelas tidak ada niatan buruk Tergugat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat.

Hakim dalam pembuktian menilai jawaban Tergugat tidak membantah keseluruhan gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti fotocopy perjanjian pembelian waralabatanggal 3 maret 2017 yang bersesuaian dengan bukti berupa Surat Perjanjian Pembelian Waralaba telah terjadi Perjanjian Pembelian Waralaba Gerai Pinky Guard di Kota Manado dimana Penggugat selaku pembeli waralaba dan Tergugat selaku penjual waralaba. Tergugat berdasarkan bukti yang diajukan menyatakan berupa fotocopy dari print out chat wa group pinky guard manado, 14 september 2017, fotocopy dari print out chat wa dengan pemilik lokasi pinky guard manado, 13 desember 2017 dan fotocopy dari print out chat wa dengan kepala cabang group pinky guard manado, 3 mei 2017 menyatakan telah terjadi perjanjian jual beli *franchise*.

Hakim dalam pembuktian melihat eksepsi tergugat bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum mengembalikan kepada Penggugat. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis. Tergugat menyatakan perjanjian tanggal 3 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama membuat perjanjian dan Pasal 5 untuk pengembaliannya akan dirembuk secara musyawarah dan kesepakatan Tergugat mencicil menurut kemampuan, fakta yang terjadi adalah penandatanganan tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2018 hal tersebut juga telah kami dokumentasikan dalam bentuk foto. Hakim dalam pembuktian menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan menyiapkan outlet dengan cara kerja sama dengan pihak ketiga di Manado, namun oleh karena sesuatu dan lain hal, maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan seperti yang seharusnya, sehingga timbul perjanjian/addendum tambahan dengan bukti fotocopy perjanjian pengembalian usaha pinky guard dikembalikan kepada Tergugat dengan uang pengembalian ditambah dana milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk operasional Pinky Guard.

Berdasarkan bukti fotocopy perjanjian pengembalian usaha pinky guard maka dana yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun

sampai dengan saat ini Tergugat belum mengembalikan dana tersebut. Bahwa dalam hubungan kontraktual, hal hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Vide pasal 1338 BW).

Kesimpulan dari pembuktian hakim dalam menentukan Pembuktian Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian jual beli *franchise* outlet Pinky Guard antara Penggugat dengan Tergugat jika dilihat berdasarkan Pasal 7 PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.

*Franchise* adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* yang (Fuadi, 2005): a) Mengizinkan atau mengharuskan *franchise* selama jangka waktu *franchise*. Untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor; b) Memberikan hak kepada *franchisor* untuk melaksanakan pengawasan berlanjut selama jangka waktu *franchise* terhadap aktivitas bisnis *franchise* oleh *franchisee*; c) Mewajibkan pihak *franchisor* untuk menyediakan bantuan kepada *franchisee* dalam hal melaksanakan bisnis *franchise* tersebut. Semisal memberikan bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen dan lain lain; d) Mewajibkan pihak *franchisee* untuk membayar secara berkala kepada *franchiseor* sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh pihak *franchisor*.

Pasal 1236 KUHPerdara menjelaskan bahwa “*si berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya*”. Bentuk wanprestasi menurut Djohar Santoso dan Achmadi Ali dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu; a) salah satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali;

Dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan perjanjian jual beli franchise sebagaimana yang telah disepakati dengan pengugat. Selain itu tergugat tidak

mengembalikan uang milik penggugat untuk membuka bisnis franchise; b) melakukan prestasi tapi keliru; c) melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya.

Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa: a) Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi); b) Pembatalan perjanjian; c) Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*; d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

### **3.3 Hakim Menentukan Putusan Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard**

Kesimpulan dari pembuktian yang dilakukan hakim dalam menentukan Pembuktian Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian jual beli *franchise* outlet Pinky Guard antara Penggugat dengan Tergugat jika dilihat berdasarkan Pasal 7 PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi. Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa ganti rugi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KHUPerdata yaitu; a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, akan tetapi pihak tergugat tidak menyediakan barang berupa outlet sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Oleh sebab itu tergugat



berdasarkan ketentuan syarat sahnya perjanjian tidak memuat syarat obyektif daripada perjanjian. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 terdapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa ganti rugi.

Hakim menentukan Putusan perkara wanprestasi dalam jual beli *franchise* outlet Pinky Guard berdasarkan pembuktian berupa keterangan penggugat dan tergugat beserta alat bukti bahwa tergugat melanggar ketentuan hukum yang berlaku diantaranya Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, *franchise* diartikan sebagai: “*Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa*”. Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan isi perjanjian jual beli *franchise* kepada penggugat, tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*.

Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba pada Pasal 7;

“menwajibkan franchisor sebagai pemberi waralaba melakukan dsiclosur terhadap berbagai aspek material yang dapat mempengaruhi keputusan franchisee sebagai penerima waralaba untuk menolak atau menerima persyaratan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba atau franchise agreement yang meliputi: a) data identitas pemberi waralaba; b) legalitas pemberi usaha waralaba; c) sejarah kegiatan usahanya; d) ) struktur organisasi pemberi waralaba; e) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f) Tempat usaha; g) daftar penerima waralaba; h) hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba”.

Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPdata dan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1236 KUHPdata, oleh sebab itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; b) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat; c) Menghukum

Tergugat untuk membayar uang dan barang yang telah diterima oleh Tergugat senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat; d) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

Putusan Hakim pada perkara wanprestasi dalam jual beli *franchise* outlet Pinky Guard bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Perjanjian jual beli *franchise* outlet Pinky Guard antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban Tergugat sebagai pemberi *franchise* (penerima waralaba) diantaranya sebagai berikut: a) Hak yang diberikan oleh *franchisor* (pemberi waralaba) pada *franchisee* (penerima waralaba); b) Kewajiban dari *franchisee* (penerima waralaba) berupa melakukan pembyaran dan mendapatkan imbalan berupa penggunaan merek, bahan baku, bantuan manajemen atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh *franchisor* (pemberi waralaba) pada saat *franchisee* (penerima waralaba) memulai usaha, maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba; c) Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak *franchisee* (penerima waralaba) kepada pihak lain; d) Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masing-masing pihak.

Hakim dalam pembuktian menilai jawaban Tergugat tidak membantah keseluruhan gugatan Penggugat. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat mengembalikan Outlet Pinky Guard Manado kepada Tergugat dan Tergugat menerima tetapi pembayaran menunggu untuk dijual, akan tetapi sampai sekarang belum laku dengan demikian Tergugat tidak melakukan wanprestasi. Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama membuat perjanjian dan untuk pengembaliannya akan dirembuk secara musyawarah dan kesepakatan

Tergugat mencuil menurut kemampuan. Tergugat menyatakan kerugian yang timbul dalam perjanjian jual beli *franchise* tidak rasional dan terkesan Penggugat mencari-cari keuntungan dalam perkara ini. Sampai saat ini tergugat masih berhubungan baik dan membuka komunikasi dengan Penggugat sehingga dengan demikian jelas tidak ada niatan buruk Tergugat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat.

Hakim dalam pertimbangan hokum menyatakan bahwa Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan kepada tergugat diantaranya berupa: a) Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi); b) Pembatalan perjanjian; c) Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*.

Kesimpulan dari pembuktian yang dilakukan hakim dalam menentukan Pembuktian Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli *Franchise* Outlet Pinky Guard bahwa Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, akan tetapi pihak tergugat tidak menyediakan barang berupa outlet sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba pada Pasal 7 huruf f) Tempat usaha; g) daftar penerima waralaba; h) hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba fsn Pasal 5 Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Putusan Hakim pada perkara wanprestasi dalam jual beli *franchise* outlet Pinky Guard bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KHUPerdata yaitu; a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu tergugat berdasarkan ketentuan syarat sahnya perjanjian tidak memuat syarat obyektif

daripada perjanjian. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 terdapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli *franchise*. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat maka hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Isi daripada putusan hakim diantaranya sebagai berikut: a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; b) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat; c) Menghukum Tergugat untuk membayar uang dan barang yang telah diterima oleh Tergugat senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat; d) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

#### **4.2 Saran**

Untuk para pihak dalam sengketa perdata pada perjanjian, diharapkan kedepannya sebelum melakukan gugatan pada pengadilan setiap kerugian yang diterima sebagai akibat dari perjanjian dilakukan perhitungan secara logis sehingga tidak dianggap mencari keuntungan.

Untuk para pihak, diharapkan menyiapkan alat bukti yang kuat saat mengajukan gugatan di pengadilan sehingga hakim dengan mudah menentukan pembuktian pada perkara serta memberikan putusannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ilhamdi. (2014). *Perjanjian Kerjasama Waralaba Antara PT. Raos Aneka Pangan Dengan Ny. HJ. Maryenik Yanda, SH.*, jom Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014
- Karamoy, Amir Putra. (2013). *Percaturan Waralaba Indonesia*, Jakarta: PT. Foresight
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Pariela, Marselo V. G.. (2017). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Sasi Volume 23 Nomor 1 Januari-Juni 2017

Salim, H. S., (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Yurisprudensi (Putusan Perkara Nomor; 18.Pdt.G/2018/PN.Skh)